

POLITIK IDENTITAS AGAMA LOKAL **Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung**

Asep Lukman Hamid

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: amangasep99@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.3554864

Abstract:

Indonesia is one of the most pluralist countries. This plurality can be seen in terms of many religions, beliefs, ethnicities, cultures and languages. This reality on the one hand is very open possibility of potential tension and social conflict. On the other hand, if being able to manage it proportionally and professionally will grow into a force capable of bringing to a more meaningful life. This paper seeks to describe the good relationship between Muslims and followers of Aliran Kepercayaan Perjalanan. In social interaction between the two occurs symbiosis mutualism without any prejudice danger. This reality is interesting to examine in order to discover the factors that become the social glue between Muslims and the followers of Aliran Kepercayaan Perjalanan and to find the political practice of their identity. Based on the field survey found that one of the factors that become social glue is because upholding the values of delay as reflected in the expression of silih asih, silih asah, and silih asuh.

Keywords: *Politik Identitas, Agama Lokal, Aliran Kepercayaan Perjalanan.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat pluralis. Pluralitas ini dapat dilihat dari segi banyaknya agama, kepercayaan, tradisi, kesenian, kultur, etnis dan bahasa. Hildred Geertz —antropolog Amerika— menggambarkan khazanah keragaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai berikut: “terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia, masing-masing mempunyai identitas budayanya sendiri-sendiri, lebih dari 250 jenis bahasa daerah dipakai, dan hampir semua agama besar diwakili, selain agama asli yang banyak jumlahnya.”¹

Pluralitas bangsa Indonesia tercermin secara nyata dari banyaknya etnis

seperti etnis Jawa, Sunda, Betawi, Sasak, Maluku, dan Minang. Masing-masing etnis mempunyai bahasa daerah (*dialek*), adat istiadat, tradisi, seni dan budaya sendiri-sendiri dengan identitas khas yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jika dilihat dari segi agama dan kepercayaan, bangsa Indonesia menunjukkan juga masyarakat yang majemuk atau pluralis. Agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha sudah lama eksis di nusantara ini dan mempunyai komunitas moral (*moral community*) masing-masing. Realitas historis-sosiologis ini menunjukkan secara nyata bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius.²

Selain agama-agama besar yang sudah membentuk komunitasnya sendiri-sendiri, ada pula kepercayaan-kepercayaan (baca: agama) lokal yang banyak jumlahnya di Indonesia. Keberadaan kepercayaan-kepercayaan lokal yang banyak dipeluk oleh suku-suku di Indonesia semakin menambah panorama pluralitas, keberagaman dan kemajemukan bangsa Indonesia. Agama dan kepercayaan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental (*ultimate*) yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari sisi kehidupan mereka.

Realitas bangsa Indonesia yang pluralis ini pada satu sisi sangat terbuka kemungkinan terjadinya ketegangan, konflik dan gejolak-gejolak sosial yang sangat potensial seperti yang terjadi dalam beberapa kasus di Jawa Barat.³ Namun, Ketika masyarakat (baca: pemerintah) mampu mengelola pluralitas ini, maka akan tumbuh menjadi kekuatan yang mampu membawa kepada kehidupan yang lebih bermakna.⁴ Sejarah membuktikan bahwa leluhur bangsa Indonesia pernah mencapai masa kejayaan dan keemasan menjadi suatu negara maju di dunia pada masa Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini mengandung arti bahwa leluhur kita telah berhasil mengatasi berbagai kendala perbedaan dan berhasil membangun potensi keberagaman menjadi kekuatan sehingga mencapai kemajuan dan kebesaran.

Begitu pula pada masa pra kemerdekaan, sejarah mencatat bahwa semangat kebersamaan dan toleransi telah berhasil mengatasi segala perbedaan dan pertentangan baik etnis, bahasa dan agama sehingga mampu mengantarkan bangsa kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Pasca kemerdekaan pemerintah menetapkan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila didalamnya mengandung nilai-nilai filosofis universal dengan prinsip “Bhineka Tunggal Ika”nya dan dalam sila pertama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi bukti bahwa meskipun bangsa Indonesia berbeda dalam agama tetapi tetap bersatu dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Tulisan ini akan mengkaji salah satu bentuk atau bagian pluralitas yang ada di Indonesia yakni kajian tentang agama atau kepercayaan lokal, lebih spesifiknya adalah kajian terhadap politik identitas yang diperankan oleh Aliran Kepercayaan Perjalanan (selanjutnya disebut AKP) yang terdapat di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Fenomena Aliran ini menjadi menarik untuk dikaji di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang

mengalami perubahan struktur sosial. Selain itu, kajian ini dianggap menarik karena meskipun penganut Aliran ini mengalami diskriminasi baik secara politik, sosial, ekonomi dan pendidikan, namun tetap diminati dan pengikutnya tetap eksis hingga sekarang.

Dari alur pikir tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitiannya (*research question*) adalah mengapa Aliran Kepercayaan Perjalanan hingga sekarang masih tetap diminati? Faktor apa sajakah yang menjadikan Aliran ini tetap eksis dan berkembang? Bagaimana politik atau kebijakan yang dipraktikkannya dalam rangka memperoleh pengakuan identitas? Untuk jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

PEMBAHASAN

1. Aliran Kepercayaan Perjalanan (AKP)

Secara historis AKP didirikan oleh Mei Kartawinata. Ia lahir pada 1 Mei 1897 di Kebonjati Bandung. Ada juga yang mencatat bahwa tahun kelahirannya 1 Mei 1898 di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Abdul Rozak, dalam buku *Teologi Kebatinan Sunda*, menyebutkan bahwa Mei Kartawinata adalah tokoh yang dikenal sebagai spiritualis. Konon beliau masih keturunan kerabat kerajaan Majapahit (dari garis ayah) dan keluarga Prabu Siliwangi dari Pajajaran (garis ibu). Pendidikan formalnya diperoleh dari Sekolah Rakyat (SR) atau HIS Zendingschool pada zaman Belanda. Selain sekolah di SR ia juga pernah mengenyam pendidikan pesantren dan berguru ilmu kebatinan kepada Mochammad Ishak yang dikenal penganut tarekat Nahdlatul 'Arifin.⁵ Ajaran tarekat ini cenderung menekankan cara seseorang dapat mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya yaitu dengan memahami rahasia *alif lam mim* yang berarti Allah-Muhammad-Adam. Dalam tarekat, seseorang dapat meraih kesempurnaan jika mampu menyelami hakikat dari Al-Qurán dan al-Hadits. Kemungkinan besar ajaran tarekat ini berpengaruh terhadap pemikiran dan sikap Mei Kartawinata di kemudian hari.⁶

Selain Mei Kartawinata, terdapat dua sahabatnya yang terlibat dalam pembentukan AKP yakni M. Rasyid dan Sumitra. Pada mulanya mereka bekerja di sebuah percetakan di Subang dan menjadi kawan karib, sehingga mereka suka berkumpul untuk membicarakan suka-duka masing-masing, baik masalah keluarga maupun keilmuan. Di antara mereka terdapat persamaan sikap yaitu mereka menyukai hal-hal yang berkaitan dengan ajaran kebatinan atau spiritual.⁷

Pada masa remajanya Mei Kartawinata ikut dan tinggal bersama kakak iparnya di kediaman sultan Kanoman Cirebon. Mei Kartawinata termasuk orang yang banyak bergaul dengan kehidupan priyai keraton, apalagi ia termasuk orang yang terpelajar, pantas ia banyak memahami ilmu kebatinan atau ilmu kepribadian Ketuhanan Yang Maha Esa di komplek Kraton Cirebon. Di keraton Cirebon banyak berkembang aliran kebatinan antara lain *Ngelmu Sejati*. Aliran ini dikenal sebagai *Agama Kuring*, atau *Ngelmu Garingan*, maksudnya ilmu kering, karena

pengikutnya kurang rajin menjalankan syariat Islam, seperti shalat yang selalu identik dengan air untuk berwudhu. Dapat kita duga ia sangat terpengaruh dengan kebatinan yang berkembang di lingkungan kraton Cirebon.

Asal mula berdirinya AKP tidak lepas dari sosok Mei Kartawinata yang pada suatu saat ia berada di tepi sungai, lalu mendengar suara tanpa jasad. Atas dasar peristiwa tersebut, para pengikutnya menyebut dengan istilah wangsit. Berdasarkan wangsit tersebut, Mei Kartawinata beserta sahabatnya membentuk organisasi AKP pada hari Sukra atau Jumat Kliwon jam 12.00 tanggal 19 Hasyi (Maulud) tahun 1858 Saka atau pada tanggal 17 September 1927. Pendiriannya bertempat di Kampung Cimerta, Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.⁸

Beliau mengagas AKP sebagai hasil dari kontemplasinya yang mendalam terhadap situasi alam, khususnya air. Nama 'Perjalanan' yang digunakan oleh Kartawinata memang mengandung makna filosofis. Hal ini berdasarkan pada pengamatan beliau terhadap 'perjalanan' air sungai Cileuleuy yang mengalir menuju hilir (lautan). Dalam perjalanan tersebut, aliran air itu telah banyak mendatangkan manfaat bagi kehidupan para penghuni alam seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Esensi inilah yang ingin diadopsi oleh Mei Kartawinata dalam mengembangkan ajarannya, bahwa sebagai manusia haruslah memberikan manfaat bagi alam sekitar kita selama 'perjalanan' manusia 'mengaliri' dinamika kehidupan.

Aliran ini disebut "Perjalanan" dimaksudkan sebagai ketegasan bahwa baik-buruknya sesuatu *tekad* (maksud) baru akan tercapai jika dijalankan secara konsekwen. Ibarat air sungai yang mengalir dari hulu menuju hilir (laut), air sungai adalah realitas bersatunya secara mutlak sekian banyak tetesan air, lalu secara bersama, tidak dapat dipisahkan menuju tujuan akhir, yaitu laut. Dalam ajaran Islam, kata "Perjalanan" identik *suluk* yang berarti rangkaian kegiatan dalam rangka meraih ma'rifat, orangnya disebut *salik*. Aliran ini berintikan pada tiga hal, yakni spiritualitas individu berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan berbasiskan persamaan, serta kebangsaan berlandaskan karakter dan *nation building*.⁹

Munculnya AKP ini tidak hanya berkaitan dengan kajian keagamaan, tetapi juga memiliki kaitan dengan aspek politik. Hal itu dapat dilihat dari tahun didirikannya yaitu tahun 1920 sampai dengan tahun 1930, saat itu bangsa Indonesia berada dalam masa kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan, seperti PNI lahir 1927, NU lahir 1926, PKI lahir 1924. Pada 1927 itu menandakan bahwa bangsa Indonesia berada pada tahap awal kebangkitan nasional, memiliki cita-cita ingin segera terbebas dari cengkeraman kaum imperialis dan kolonialis menuju Indonesia merdeka.

Keterlibatan Mei Kartawinata dalam politik adalah bahwa ia pernah menjadi aktifis perjuangan melawan Belanda. Menurut para pengikutnya, dimasa pergerakan nasional beliau sangat dekat dengan kalangan pergerakan yang

berideologi Marhaenis, termasuk Bung Karno. Bahkan menurut salah satu sumber, sang spiritualis adalah kawan diskusi Bung Karno mengenai berbagai hal menyangkut politik dan ideologi, termasuk mengenai ideologi negara Indonesia bila merdeka kelak. Selain itu, ia tercatat pernah dipenjarakan oleh Belanda di Bandung pada tahun 1937, di Cirebon pada 1947, di Glodok pada 1945 dan oleh Jepang pada 1943.¹⁰ Menjelang tahun 1955 ia beserta J.B. Assa mendirikan Partai Permai (Persatuan Rakyat Marhaenis). Partai ini memperoleh dua kursi di Konstituante. Oleh karena dapat diduga bahwa lahirnya AKP adalah sebagai alat perjuangan untuk melawan Belanda.¹¹

Dengan demikian terdapat dua aspek kelahiran AKP. Di satu sisi, pengalaman keberagamaan (*religious experience*) yang dialami Mei menjadi latar belakang lahirnya aliran ini. Pengalaman spiritual itu terekspresikan dalam bentuk wangsit yang diterima oleh Mei Kartawinata yang berdampak pada perumusan nilai-nilai ajaran, ritual dan organisasi keagamaan sampai hari ini. Pada sisi lainnya, situasi politik pada masa kebangkitan nasional dimana ia terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis bahkan sempat mendirikan partai politik dan ikut serta dalam pemilu.

Menurut Suhanah salah seorang peneliti dari Puslitbang Kementerian Agama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rozak bahwa AKP ini merupakan varian baru dari Agama Sunda Wiwitan (Sunda Buhun) dengan beberapa nama di antaranya Agama Traju Trisna, Agama Pancasila, Agama Yakin Pancasila, Agama Petrap, Agama Sunda, Ilmu Sejati Permai, atau Jawa Jawi Mulya.¹² Ia merupakan salah satu varian dari agama Sunda Wiwitan --Lebak Banten-- di masa sekarang. Pengikut AKP ini sampai sekarang masih ada terutama di Desa Pakutandang Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.¹³

2. Tata Keimanan Aliran Kepercayaan Perjalanan

Menurut Joachim Wach terdapat tiga aspek dalam agama yaitu ajaran atau doktrin, ritual dan kelompok masyarakat beragama.¹⁴ AKP jika dilihat dari perspektif *religious studies* dapat dikategorikan sebagai agama. Bagi para antropolog, tidak terlalu signifikan membedakan antara agama formal dan aliran kepercayaan. Mereka tidak membedakan antara agama resmi dan agama tidak resmi atau antara agama mainstream dan agama minoritas, termasuk juga tidak membedakan antara agama samawi dan agama bumi. Yang penting agama memiliki nilai-nilai kepercayaan (*religious believes*) yang memberikan pengaruh signifikan di dalam diri seseorang (fungsional).

Untuk memahami agama dapat dilihat dari definisi agama sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim. Agama menurutnya adalah suatu sistem kepercayaan dan praktek yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang sakral, kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal.¹⁵

Dari perspektif tersebut, AKP memiliki unsur-unsur sebagai sebuah agama yakni doktrin, ritus dan komunitas pengikutnya. Dalam tataran teologis (baca: doktrin), AKP meyakini adanya sesuatu yang sakral yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa, mereka percaya dan yakin terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai kekuatan yang sakral dan mereka merumuskannya dalam istilah *Dasa Wasita* yang berarti sepuluh wangsit yang diterima oleh Mei Kartawinata. Wangsit ini diperoleh Mei Kartawinata sebagai pendiri aliran kebatinan perjalanan melalui pengalaman keagamaannya. Kesepuluh Wangsit tersebut adalah:

Pertama, Janganlah dirimu dihina dan direndahkan oleh siapapun, sebab dirimu tidak lahir dan tidak besar oleh sendirinya, akan tetapi dirimu dilahirkan dan dibesarkan penuh dengan cinta kasih ibu dan bapakmu. Bahkan dirimu itu sendirilah yang melaksanakan segala kehendak dan cita-citamu yang seyogyanya kamu berterimakasih kepadanya; *Kedua*, Barang siapa menghina dan merendahkan dirimu, sama juga artinya dengan menghina dan merendahkan ibu bapakmu bahkan leluhur bangsamu; *Ketiga*, Tiada lagi kekuatan dan kekuasaan yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Tuhan YME, belas dan kasih. Sifat belas dan kasih itupun dapat mengatasi dan menyelesaikan segala pertentangan atau pertengkaran, bahkan dapat memadukan paham dan usaha untuk mencapai tujuan yang lebih maju serta menyempurnakan akhlak dan meluhurkan budi pekerti manusia; *Keempat*, Dengan kagum dan takjub kamu menghitung tetesan air yang mengalir yang menuju kesatuan mutlak yaitu lautan, sambil memberikan manfaat kepada kehidupan manusia, binatang, dan pepohonan atau tetumbuhan. Akan tetapi kamu belum pernah mengagumi dan takjub kepada dirimu sendiri yang telah mempertemukan kamu dengan dunia beserta segala isinya. Bahkan kamu belum pernah menghitung kedip matamu. Sungguh betapa nikmatnya apa yang kamu rasakan, padahal semua itu sebagai hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa; *Kelima*, kemanapun kamu pergi dan dimanapun kamu berada, Tuhan YME akan selalu bersama denganmu; *keenam*, perubahan besar dalam kehidupan dan penghidupan manusia akan menjadi pembalasan terhadap segala penindasan serta mencetuskan atau melahirkan kemerdekaan hidup bangsa; *kedelapan*, cintailah sesama hidupmu tanpa memandang jenis dan rupa. Sebab apabila hidup telah meninggalkan jasad, siapapun akan berada dalam keadaan yang sama. Ia tidak mempunyai daya dan upaya. Justru selama itu, selama kamu masih hidup, berusaha agar kamu dapat memelihara kelangsungan hidup sesamamu. Sesuai dengan kodratnya menurut kehendak Tuhan Yang Maha Esa; *kesembilan*, Batu di tengah sungai, jikalau olehmu digarap menurut kebutuhan, kamu menjadi kaya raya karenanya. Dalam hal itu, yang membuat seseorang kaya raya bukanlah pemberian batu itu, akan tetapi yang membuat kaya raya adalah hasil kerjamu sendiri; *kesepuluh*, geraklah untuk kepentingan sesamamu, bantulah yang sakit untuk mengurangi penderitaannya. Jaga (bahasa Sunda, artinya kelak kemudian hari) kan tercapailah masyarakat kemanusiaan yang menegakkan kemerdekaan

dan kebenaran.¹⁶

Dalam wangsit tersebut terkandung nilai-nilai yang harus dilaksanakan oleh pengikut AKP baik yang berupa larangan, peringatan dan perintah. Bila ditelaah lebih lanjut, isi dari Dasa Wasita tersebut cenderung sosialis, sehingga pengikut AKP ini harus bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia sebagai individu dalam pergaulannya dengan orang lain apalagi masyarakat umum hendaknya mengedepankan kepentingan bersama, ia harus terhidar dari sikap egois dan individualis.

Dalam tatanan ritual, AKP memiliki tradisi atau upacara tradisional dalam masyarakat. Terdapat dua jenis tradisi yaitu tradisi yang berkaitan dengan kehidupan dan tradisi yang berkaitan dengan penghidupan. Tradisi yang berkaitan dengan kehidupan dilakukan para penganut aliran kebatinan melalui upacara selamatan 7 bulan kandungan, khitanan, perkawinan dan kematian. Upacara kematian dilaksanakan pada saat setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun (mendak) dan 1000 hari. Sedangkan tradisi yang berkaitan dengan penghidupan dilakukan para penganut AKP melalui upacara menanam padi, memotong padi dan membangun rumah.

Dalam setiap upacara tersebut terdapat pelaku, kegiatan, benda, waktu dan tempat tertentu. Semua unsur ritual itu memiliki makna dan maksud tertentu. Contoh unsur benda-benda yang digunakan dalam ritual diantaranya perhiasan, pakaian baru, kain, kembang-kembangan, daun-daunan dan sebagainya. Salah satu ritual yang menarik dari aliran kebatinan perjalanan ini adalah ketika mereka membangun sebuah rumah. Terdapat benda dan makna tertentu dalam mendirikan rumah. *Pertama*, kain berwarna merah dan putih diikatkan di atap rumah yang baru beridiri. Warna merah melambangkan darah dari ibu, dan putih melambangkan darah dari Bapak. Warna merah putih artinya badan-badan sekujur yang berasal dari Ibu dan Bapak. Pemasangan kain berwarna merah putih di atap rumah tersebut maksudnya dalam rumah itu hendaknya sifat dan perbuatan manu-siawilah yang tertinggi kedudukannya. *Kedua*, padi segendeng atau dua ikatan padi. Maksudnya adalah keseimbangan antara satu dengan yang lainnya yaitu antara lahir dan batin, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara keluarga dan masyarakat. *Ketiga*, tebu. Dalam tebu itu terdapat rasa manis yang artinya bahwa suasana hidup penuh “memanis” yaitu adanya saling meng-hormati, menghargai dengan menjauhkan segala perbuatan yang menimbulkan kepahitan terhadap orang lain. *Keempat*, pisang setandan. Dalam setandan pisang terdapat pisang teratas dan besar yang disebut *seuhang* dan *butiti* yaitu pisang terkecil pada tandan. Keduanya berasal dari jantung pisang yang sama, walaupun hasilnya berbeda. Maksud dari pisang setandan itu adalah bahwa manusia dengan darma dan karmanya menduduki keadaan yang berbeda.¹⁷

Aspek komunitas dalam aliran kepercayaan perjalanan terbentuk ketika orang-orang percaya dan meyakini apa yang disampaikan Mei Kartawinata yang

bersumber pada wangsit. Hal ini sesuai dengan kategori Durkheim bahwa apabila terdapat sistem keyakinan yang dianggap sakral dan dipraktikkan dalam bentuk ritual, maka para pelakunya akan membentuk komunitas bermoral (*moral community*). Sehingga agama menurut Durkheim didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan kelakuan yang mempersatukan (pengikutnya) ke dalam suatu komunitas moral.¹⁸ Definisi ini menunjukkan peran agama yang paling penting adalah untuk kepentingan kelanjutan hidup masyarakat itu sendiri.

Aliran kebatinan perjalanan dapat dikelompokkan sebagai kelompok bermoral, karena kelompok ini mengajarkan tentang nilai-nilai moral bagi para penganutnya sebagaimana dalam sistem kepercayaan yang bersumber pada sepuluh wangsit. Ketika orang-orang mengakui dan percaya terhadap wangsit yang dialami oleh Mei Kartawinata, maka sejak itu terbentuk komunitas bermoral atau komunitas religious. Komunitas religious aliran kebatinan perjalanan ini mengalami perkembangan melewati zaman pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan, zaman orde lama, orde baru sampai sekarang dengan membentuk organisasi sosial, organisasi politik

Mei Kartawinata dalam mengembangkan ajarannya mengadopsi ajaran yang terdapat pada Sunda Wiwitan sehingga dapat dikatakan bahwa AKP merupakan varian dari Sunda Wiwitan atau Sunda Buhun. Diantara gagasan pemikiran atau ajarannya ia tuangkan dalam bentuk buku dengan judul Budi Daya. Dalam buku ini, disebutkan makna dari masing-masing sila dalam Pancasila. Sila KeTuhanan Yang Maha Esa diartikan sebagai "*daya kaula*", sila Kemanusiaan bermakna "*badan kaula*", sila Kebangsaan maknanya "*bakat kaula*", sila Kedaulatan Rakyat berarti "*darah kaula*", serta sila Keadilan Sosial memiliki makna "*kacukupan kaula*". Jadi dalam arti lain, peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah sebagai pemberi kekuatan dan energi bagi rakyat dalam mencapai kesejahteraan bersama seluruh rakyat "*kacukupan kaula*".¹⁹ Barangkali atas dasar itu, sebagian orang menganggap bahwa AKP adalah identik dengan sebutan Agama Pancasila.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Perekat Sosial

Bila dicermati dari ajaran AKP sebagaimana yang tertuang dalam Dasa Wasita menunjukkan sikap penghayat kepercayaan yang toleran, terbuka dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jati diri dan kepribadiannya tersebut merupakan suatu ajaran yang berbasiskan pada agama warisan leluhur (karuhun) masyarakat Sunda (dalam hal ini Sunda Wiwitan yang terdapat di Lebak Banten), sehingga tiadalah salah jika dikatakan bahwa AKP merupakan kelompok/aliran penghayat kepercayaan dan varian dari Sunda wiwitan.

Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:

- a. Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), suku

- Batak (Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Papua.
- b. Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawen pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning Budi (MSB), Budi Luhur dan lain sebagainya.
 - c. Kelompok penghayat kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya.
 - d. Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika.²⁰

Pada sisi lain, bahwa masyarakat Sunda menerima Islam dengan suka cita dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari telah memberikan inspirasi kepada Endang Saefudin Anshari untuk menyatakan secara retorik bahwa *Islam teh Sunda* dan *Sunda teh Islam*; artinya bahwa Islam itu sama dengan Sunda, Sunda itu ya Islam.²¹ Bukti-bukti keharmonisan antara Sunda dan Islam tampak dari berbagai sikap religiusitas orang Sunda salah satunya terungkap dalam peribahasa “*diri sasampiran awak sasampaian*”. Artinya, semuanya merupakan kepunyaan Allah SWT. Oleh karena itu manusia Sunda dalam kehidupannya selalu menggunakan rasa “*boga rasa rumasa, ngaji diri*”.

Manusia Sunda memiliki filosofi ketuhanan yaitu “*mulih ka jati mulang ka asal*” sepadan dengan ajaran Islam *Innalillâhi wainna ilaihi râjiûn*. Dalam bermasyarakat manusia Sunda memiliki norma dan etika seperti *ulah pagiri-giri calik pagirang-girang tampian*” (janganlah berebut kekuasaan dan jabatan). Etika bermasyarakat ini sepadan dengan hadits Nabi yang berbunyi, “jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya”. Hal ini menurut Didi Turmudzi – Mantan Rektor Unpas dan Ketua Paguyuban Pasundan—berbeda dengan fenomena demokrasi sekarang dimana orang yang ingin jabatan harus pamer dan menyombongkan diri lewat kampanye, istilah Sundanya, *ägul ku payung butut*” artinya, bangga dengan prestasi jelek.²²

Berdasarkan sekian banyak titik temu antara budaya Sunda dan Islam maka sangat wajar jika kemudian Sunda identik dengan Islam dan Islam identik dengan Sunda. Kekuatan aqidah akan adanya satu-satunya ilah, yang berhak disembah dan

pengalaman keislaman yang dipandu oleh kesadaran keimanan yang mendalam telah menjadikan komunitas Sunda identik Islam, sehingga akan terasa aneh apabila ada orang Sunda yang bukan Islam.

Dalam konteks keindonesiaan, umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia, umat Islam secara tidak langsung memiliki tanggungjawab moral untuk mengembangkan sebuah pola hubungan dengan minoritas secara ramah, produktif dan humanis. Pola hubungan damai yang dikembangkan oleh Islam di Indonesia pada gilirannya akan berkontribusi bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus dapat disumbangkan bagi penciptaan peradaban dunia yang lebih damai. Di saat sebagian negara-negara Barat menaruh curiga dan pada tingkat tertentu phobia terhadap Islam atau negara-negara Timur Tengah, sebetulnya Barat menaruh harapan akan hadirnya wajah Islam yang damai dari Indonesia. Wajah Islam Indonesia diakui sebagai Islam moderat yang lebih toleran terhadap perbedaan.²³ Tidaklah berlebihan jika Hillary Clinton memuji proses demokratisasi di Indonesia. Hillary misalnya menyatakan, *"If you want to know of Islam, democracy, modernity and women's rights can co-exist, go to Indonesia."*²⁴ pernyataan mantan menteri luar negeri Amerika Serikat ini mengisyaratkan adanya harmoni dan kerukunan di Indonesia.

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan antar sesama penduduknya tanpa membedakan agama, bahasa dan etnisnya. Hal itu diwujudkan dengan disahkannya ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Culture Right) menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 pada Tanggal 28 Oktober 2005, dan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Right) menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005.

Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kovenan kedalam bentuk undang-undang, selain itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk:

- a. Penghormatan (*to respect*);
- b. Perlindungan (*to protect*); dan
- c. Pemenuhan (*to fullfil*).

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua

manusia setara (*all human being are equal*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Prinsip ketiga ialah *imparsialitas*. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan.

Berdasarkan alur pikir diatas maka yang menjadi daya perekat sehingga terjadi kehidupan yang harmoni dalam perbedaan antara Islam dan AKP adalah bahwa AKP dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitarnya senantiasa mengedepankan *nilai-nilai luhur yang terdapat dalam budaya Sunda; budaya Sunda pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam*, dus, relasi damai antara keduanya dapat mewujudkan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti adanya gotong royong dalam upacara keagamaan, membangun sarana umum, bahkan salah seorang penghayat yang bernama Ama pernah menjabat Ketua RT selama dua periode (sepuluh tahun).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga Negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.

4. Politik Identitas Aliran Kepercayaan Perjalanan

Sebagaimana diketahui bahwa sejak kemerdekaan hingga sekarang bangsa ini terus mengalami perubahan di berbagai aspek termasuk ekonomi, politik teknologi, pendidikan dan sebagainya. Masa orde lama cenderung melakukan perubahan ke arah politik. Orde Baru melakukan perubahan ke arah ekonomi. Pada pasca orde baru atau reformasi perubahan cenderung dilakukan mengarah ke birokrasi. Sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia sangat rentan munculnya permasalahan sosial antara unsur yang satu dengan unsur lainnya. Termasuk relasi antara agama dan politik bisa muncul sebagai masalah pada kondisi yang tidak stabil.²⁵

Meskipun sejak kemunculannya, aliran kebatinan dianggap sebagai aliran sempalan yang menyimpang, akan tetapi perjuangan politik identitas yang dilakukan oleh aliran kebatinan ini sampailah pada titik legalitasnya meskipun tak cukup memuaskan. Secara organisasi, perjuangan aliran kebatinan di mulai ketika

BKKI melakukan kongres pertama di Semarang pada 19-21 Agustus 1955 yang dihadiri oleh 70 anggota aliran kebatinan. Dalam kongres ini dihasilkan kesepakatan akan definisi kebatinan yaitu; kebatinan adalah *sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono*. Selanjutnya pada kongres BKKI yang kedua di Solo tanggal 7-9 Agustus 1956 dilakukan perubahan definisi aliran kebatinan menjadi; *"kebatinan adalah sumber asas dan sila ketuhanan yang maha esa, untuk mencapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup"*. Alasan digantinya definisi kebatinan adalah karena pada definisi pertama masih ada kemungkinan bagi suatu aliran yang mengingkari dan memungkirinya adanya Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

Perjuangan selanjutnya adalah pada kongres BKKI yang ketiga di Jakarta 17-20 Juli 1958. Dalam kongres ini disepakati bahwa aliran kebatinan bukanlah klenik sebagaimana yang dituduhkan orang. Dan perjuangan aliran kebatinan untuk mendapatkan legalitasnya mulai berbuah ketika kongres ke empat di Malang pada bulan Juli 1960. Dalam kongres ini dibahas tentang nisbah antara aliran kebatinan dan agama pada dasarnya sama, hanya titik berat yang berbeda. Agama minitikberatkan penyembahan kepada Tuhan, sedangkan kebatinan menekankan pengalaman batin dan penyempurnaan manusia.²⁷

Perjuangan kelompok aliran kebatinan berbuah manis yakni ketika dikeluarkannya Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973-22 Maret 1973 yang mengakui eksistensi aliran kebatinan di Indonesia meskipun dengan nama lain yakni "Aliran Kepercayaan". Meskipun eksistensi secara legalitas diakui keberadaannya di Indonesia, akan tetapi dalam praktek kebijakan-kebijakannya kerap kali berperilaku tidak adil dan diskriminatif. Lihat saja, sampai saat ini pemerintah masih sering menuding agama atau kepercayaan masyarakat adat sebagai agama sempalan yang harus kembali ke agama induknya. Akan tetapi sampai saat ini para penganut agama lokal, justru agama dan kepercayaan merekalah yang seharusnya disebut sebagai agama asli atau agama induk yang sebenarnya. Menurut mereka, agama-agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha) yang kini diakui secara resmi oleh pemerintah adalah justru merupakan agama impor (iriman). Jauh sebelum kelima agama tersebut datang ke Indonesia, agama dan kepercayaan yang mereka anut sudah hidup ribuan tahun. Lalu mengapa mereka sampai saat ini masih mendapatkan diskriminasi pengakuan identitas? Aliran-aliran kebatinan, kepercayaan sampai saat ini masih di anggap sebagai bukan agama, ia adalah produk manusia. Karena itu, kebatinan lebih tepat disebut dengan "kebudayaan spiritual" atau "kebudayaan batin". Oleh sebab itu wajar dan tepat bila pemerintah kemudian memindahkan urusan kebatinan dari Departemen Agama ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut PAMA PUJA (Panguyuban Masyarakat Adat Pulau Jawa, yaitu gerakan yang mewakili masyarakat adat di Jawa), salah satu masalah paling berat yang dihadapi masyarakat adat Jawa adalah hak untuk menjalankan agama atau kerpercayaannya, dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan pentaatan.

Salah satu bentuk diskriminasi lainnya adalah belum adanya pengakuan aliran-aliran kebatinan sebagai agama. Hal ini terlihat dari rumusan definisi agama versi pemerintah. Menurut pemerintah Indonesia, “agama adalah sistem kepercayaan yang disusun berdasarkan kitab suci memuat ajaran yang jelas, mempunyai nabi dan kitab suci”. Dari definisi ini, maka aliran kebatinan tetap tidak diakui sebagai agama.

Kementerian Agama dalam hal ini hanya mengakui dan menetapkan enam agama secara resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Penetapan itu antara lain menyebutkan larangan melakukan penafsiran atau kegiatan yang “menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.” Ini dijelaskan lebih lanjut dalam bagian penjelasan: “Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”.

Salah satu korban dari kebijakan negara dalam soal ini adalah kelompok-kelompok penganut agama adat atau aliran kepercayaan. Mereka semuanya diarahkan kembali ke agama induk, misalnya para penganut Sunda Wiwitan (Baduy) diarahkan kembali ke agama Hindu. Bahkan aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri di luar agama, melainkan dipandang sebagai budaya saja.

Diskriminasi ini menurut hemat saya adalah hal yang aneh. Bukankah jika kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, dijelaskan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Bahkan dalam Pasal 28I, juga dijelaskan pula: (1) hak beragama ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Jaminan tersebut juga terdapat dalam UUD 1945 pasal 29 yaitu: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan dalam Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 dijelaskan: (1) Setiap orang bebas memeluk UU No.1/PNPS/1965, jo. UU No.5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Problema saat ini, nampaknya agama-agama besar telah melakukan perselingkuhan dengan kekuasaan. Undang-undang yang dirancang nampaknya tidak hanya murni kepentingan hukum saja, akan tetapi juga di dalamnya kental

kepentingan politik, sehingga undang-undang yang dirancang sangat bias kepentingan mayoritas dan menganaktirikan kelompok minoritas dalam hal ini agama atau kepercayaan lokal.

Pada masa pasca reformasi telah terjadi problem kebangsaan yang memprihatinkan, yaitu maraknya aksi anarkisme massal yang berbasis pada isu kesukuan, keagamaan-keyakinan, maupun rasisme. Dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, masyarakat sedang mengalami gejala intoleransi dalam kehidupan keagamaan, misalkan dalam bentuk diskriminasi pelayanan terhadap para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan (YME).

Serangkaian tindakan intoleran dan diskriminasi menunjukkan, bahwa gambaran tentang persatuan dan kesatuan bangsa telah mengalami degradasi. Menurut Mahfud MD, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berkeyakinan, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja terjadi masalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas masalah kebebasan beragama. Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama dan berkeyakinan, khususnya terhadap agama minoritas maupun kelompok penghayat serta masyarakat adat yang notabene termarginalkan.²⁸

Perjuangan politik identitas selanjutnya pada Pasca Reformasi, para penghayat Aliran Kepercayaan, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 mereka bersukacita karena Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka mengajukan uji materi Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Penghayat Kepercayaan merasa senang sebab akhirnya pemerintah mengakui kepercayaan yang dianutnya dan membuat kesempatan bagi anak-anaknya untuk mengikuti pendidikan, melaksanakan ritual dan mendapatkan pekerjaan terbuka lebar.

Selama ini, para penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Aliran Kepercayaan Perjalanan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak dan Sapto Darmo mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik. Pasalnya, kolom agama dalam KK dan KTP mereka dikosongkan. Hal itu berdampak pada sulitnya mengurus hak-hak sipil politik, seperti melamar pekerjaan, menikah dan mengakses layanan publik lainnya. Dengan adanya putusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

PENUTUP

Aliran Kepercayaan Perjalanan sampai saat ini masih dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia diantaranya terdapat di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, DKI Jakarta, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Yang diluar wilayah Kabupaten Bandung biasanya berkumpul pada saat ulang tahun AKP yaitu tiap tanggal 1 Mulud.

Kajian aliran kepercayaan perjalanan dalam konteks Indonesia yang berdasar Pancasila dianggap penting sebagai kerangka pemikiran dan kerja dalam memelihara integrasi bangsa. Aliran Kepercayaan Perjalanan tidak hanya dilihat sebagai budaya tetapi juga bisa dipahami sebagai agama, karena unsur-unsur agama terdapat dalam aliran kebatinan perjalanan itu. Dalam aliran kepercayaan perjalanan terdapat nilai yang dianut dan merupakan falsafah hidupnya yaitu *cageur, bageur, bener, pinter dan selamat*. Nilai-nilai religius yang bersumber dari wangsit dijadikan cara dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, dalam melakukan aktifitas sehari-hari penganut AKP dapat berbaur dengan masyarakat sekitarnya.

Banyaknya aliran-aliran kebatinan atau kepercayaan yang ada di Indonesia, hendaknya mulai saat ini dipandang sebagai kekayaan kultural bangsa Indonesia dan bukan malah dicurigai dan diperangi sebagaimana pengalaman sejarah. Dari sana dapat terbangun suasana masyarakat yang damai dan kehidupan yang harmonis. Karena itu, tugas selanjutnya adalah memelihara dan merawat kearifan lokal itu agar senantiasa hidup dan menyala di dalam hati nurani manusia Indonesia. Kalau nilai itu terus dipupuk, dirawat dan selalu menjadi ikhtiar dan tindakan seluruh manusia Indonesia, mungkin tak akan ada lagi anak yang harus kehilangan bapak atau ibunya hanya karena beda agama, pemahaman agama, aliran politik, etnisitas dan aroma rasis lainnya. Juga tak akan ada lagi rumah dan harta benda yang dijarah dan dibakar hanya karena perbedaan identitas. Setiap konflik terdapat resolusinya, para leluhur telah memberikan peninggalan atau warisan nilai untuk itu. Kini tinggal tekad bangsa ini mau menggunakan atau membuangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan*, Bandung: Kiblat, 2005.
- Ahmad Syafii Mufid (ed.) *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

- Ajip Rosjidi, *Mencari Sosok Manusia Sunda*, Pustaka Jaya: Jakarta, 2010.
- Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Didi Turmudzi, *Keserasian Islam dan Sunda dalam*, <http://pajajaran.blogspot.com//keserasian-Islam-Sunda.html>.
- Efendi, Bachtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Jogjakarta: Galang Press, 2001.
- Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009.
- Emile Durkheim, *The Elementary Formd of the Religious Life*, terj. Inyik Ridwan Muzir, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.
- Herbert Feith dan Lance Castles, ed., *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hildred Geertz (peny.) *"Indonesian Cultures and Communities,"* New Haven, Yale University Press, 1963.
- IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2009.
- Ilim Abdul Halim, "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara" dalam *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 1 No. 1 September 2016.
- Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*. Terj. Zam'annuri, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lembaga Administrasi Negara, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: LAN, 2014.
- Mahfud MD, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi, Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia*, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta.
- Máruf, Jamhari, *Pendekatan Antropologi Dalam Kajian Islam*, Artikel Pilihan dalam Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, www.ditperta.net.
- Oki Wahyu Budijanto, "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung", dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia* Volume 7 No. 1, Juli 2016.
- R.R. Alford, *Agama dan Politik*, Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis. diedit oleh Roland Robertson, terj. Achmad Fedyani Saepudin Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- Sholehuddin, *Pluralisme Agama dan Toleransi*, Depok: Binamuda Cipta, 2010.
- Suwarno, Imam S., *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- The Wahid Institute, *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014*.

Catatan Kaki

1. Hildred Geertz (ed.) *"Indonesian Cultures and Communities,"* (New Haven: Yale University

- Press, 1963), 24.
2. Ahmad Syafii Mufid (ed.) *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), xi-xii.
 3. Misalnya, "Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Dan Intoleransi 2014" yang dikeluarkan oleh The Wahid Institut menyatakan bahwa di provinsi Jawa Barat terdapat 55 peristiwa konflik agama. Lihat, Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naispospos (ed.), *Negara Menyangkal Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2010*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2011).
 4. Sholehuddin, *Pluralisme Agama dan Toleransi*, (Depok: Binamuda Cipta, 2010), 17.
 5. Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Perjalanan* (Bandung: Kiblat, 2005), 129.
 6. Wawancara dengan Bapak Ujun, salah seorang pengikut AKP pada tanggal 20 Februari 2018.
 7. Ilim Abdul Halim, "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara" dalam *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 1 No. 1 (September 2016), 78.
 8. Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda ...*, 119.
 9. Oki Wahyu Budijanto, "P penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung", dalam *Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1*, Juli 2016, 42.
 10. Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda*, 124.
 11. Ilim Abdul Halim, "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan ...", 80.
 12. Abdul Rozak, *Teologi Kebatinan Sunda*, 119.
 13. Pengikut AKP yang berdomisili di Desa Pakutandang berjumlah sekitar 83 orang. Wawancara dengan bapak Ujun pada tanggal 20 Februari 2018
 14. Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama*, Terj. Zam'annuri (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 55.
 15. Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life*, terj. Inyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 67.
 16. Ilim Abdul Halim, "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara", 82-83.
 17. Ilim Abdul Halim, "Nilai-Nilai Aliran Kebatinan Perjalanan Dan Dasar Negara", 85.
 18. Emil Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, terj. Isyik Ridwan Muzir (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2003), 66.
 19. Oki Wahyu Budijanto, "P penghormatan Hak Asasi Manusia ...", 42.
 20. IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia* (Pustaka Pelajar: Jogjakarta, 2009), 53.
 21. Ajip Rosjidi, *Mencari Sosok Manusia Sunda* (Pustaka Jaya: Jakarta, 2010), 50.
 22. Didi Turmudzi, *Keserasian Islam dan Sunda* dalam, <http://pajajaran.blogspot.com//keserasian-Islam-Sunda.html>.
 23. Dunia internasional sering menggambarkan bahwa Indonesia sebagai "the smiling Islam" atau "the seed of moderat muslim", demikian tulis Newsweek sebagaimana diceritakan Syafi'i Anwar. Lihat M. Syafi'i Anwar, "Ketika Pluralisme diharamkan dan Kebebasan Berkeyakinan Dicederai" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bungai Rampai 70 Tahun Djohan Effendi* (Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009), 426.
 24. <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/04/indonesia-a-democracy-model.html>.
 25. R.R. Alford, "Agama dan Politik", *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, diedit oleh Roland Robertson, terj. Achmad Fedyani Saepudin (Jakarta: CV. Rajawali, 1988), 39.
 26. Imam S. Suwarno, *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 93.
 27. Ibid., 94
 28. Mahfud MD, *Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Konstitusi*, Makalah yang disampaikan

dalam Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) pada Senin, 5 Oktober 2009 di Ruang Vanda II Wisma Serbaguna, Jakarta, 1.